

## **ANALISIS STRATEGI DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**ANASTASYA BUNGKURAN**

**GUSTAAF B. TAMPI**

**RULLY MAMBO**

### *Abstract*

This study aims to see the extent of the local government's strategy in dealing with unemployment in the Talaud Islands Regency and see what are the obstacles to the local government in overcoming unemployment in the Talaud Islands Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. Based on the results of the study, it shows that, for the objectives or targets that have been implemented properly by prioritizing the unemployed community in every existing policy strategy, the policy strategies that have been made and are being implemented in tackling unemployment in the Talaud Islands Regency have not been able to overcome unemployment because not all the unemployed community that can be reached with the policy strategy that is being implemented, and for the activity stages of the policy strategy being implemented, it can be seen from the activities that have been carried out in order to support the policy strategy that is being carried out by the Regional Government.

*Keywords: Unemployment, strategy, SME Cooperative Service and Manpower*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana strategi pemerintah daerah dalam menganggulangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud dan melihat apa saja yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran di kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian yang digunakan digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk tujuan atau sasaran sudah dilaksanakan dengan baik dengan lebih memprioritaskan masyarakat pengangguran di setiap strategi kebijakan yang ada dapat, untuk strategi kebijakan yang dibuat dan sedang di laksanakan belum dapat mengatasi pengangguran karena tidak semua masyarakat pengangguran yang dapat di jangkau dengan strategi kebijakan yang sedang di laksanakan, dan untuk tahapan kegiatan dari strategi kebijakan yang dijalankan, dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka menunjang strategi kebijakan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci : Pengangguran, strategi, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja**

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan sebuah daerah yang sedang giat-giat membangun dan daerah yang merupakan daerah yang berada di bagian Utara Pulau Sulawesi, merupakan wilayah paling ujung sebelah Timur pada bagian Indonesia Timur, yang berbatasan dengan wilayah Filipina yaitu daerah Davao Del Sur di bagian Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah penduduk yang berjumlah 94.521 jiwa pada Tahun 2020. Berdasarkan data dari hasil

sensus penduduk pada September 2020 mencatat bahwa rasio jenis kelamin Tahun 2020 sebesar 106,4 yang artinya bahwa di antara 100 orang wanita terdapat 104 orang laki-laki. Jumlah angkatan (penduduk usia 15 tahun ke atas) kerja di Kabupaten Kepulauan Talaud di Tahun 2020 mencapai 56.964 dan bukan angkatan kerja (usia 15 tahun ke bawah), berjumlah 13.392 jiwa. Dengan di antaranya yang bekerja sebanyak 55.459 jiwa sedangkan pengangguran terbuka sebesar 1.505 jiwa dibandingkan dengan tingkat

pengangguran terbuka pada Tahun 2019 yang berjumlah 1.369 jiwa. Data kedalaman kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang meningkat pada Tahun 2020 sebanyak 8.84 jiwa atau jika dipresentasikan menjadi 9,49%, dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 9,10 ribu atau dipresentasikan sebanyak 9,86% ([www.talaudkab.bps.go.id](http://www.talaudkab.bps.go.id))

Berdasarkan hasil data penduduk di atas maka perlu adanya perhatian pemerintah daerah mengenai masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dapat lebih diambil perhatian agar untuk segera mencari solusinya.

Dilihat dari fakta lapangan yang ada dengan permasalahan yang dihadapi bahwa masih banyak masyarakat usia produktif yang telah selesai pendidikan dan lebih menetap di daerah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan ketimbang yang lebih memilih merantau untuk mendapatkan pekerjaan diluar daerah, masyarakat merasa bahwa mencari pekerjaan di daerah sendiri sangat sulit dibandingkan dengan harus pergi mencari pekerjaan di luar daerah. Selain waktu mempengaruhi dalam proses mencari kerja di Kabupaten Kepulauan Talaud, tingkat pendidikan memiliki pengaruh untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi akan lebih muda untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pengangguran.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja perlu melakukan cara-cara ataupun alternatif-alternatif yang perlu diambil dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud jika dibiarkan akan terus terjadi,

akibatnya jumlah kemiskinan akan semakin meningkat sehingga menimbulkan masalah-masalah ekonomi ataupun sampai pada tindakan kriminalitas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan yang telah dijelaskan, maka sangat penting untuk segera dipahami juga penting untuk dapat memberikan masukan serta solusi mengenai Analisis Strategi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud agar ke depannya lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah pengangguran.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didukung oleh beberapa referensi yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perbandingan dengan penelitian mengenai perbedaan dan persamaan yang ada. Maka peneliti Menyusun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama berasal dari penelitian Yusran Doni Tahir, Burhanuddin Kiyai dan Salmin Dengo (Jurnal Administrasi Publik, 2021), dengan judul “ Strategi Promosi Pariwisata Bunga di kota Tomohon” bahwa berdasarkan analisis SWOT menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Motoling Dua memiliki keuntungan yakni dimana Dinas Pariwisata Kota Tomohon mendapatkan kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Dinas Pariwisata disarankan untuk melakukan strategi agresif yaitu memaksimalkan peluang yang sudah ada dengan menggunakan kekuatan peluang dengan sebesar-besarnya. Hasil analisis lingkungan eksternal menunjukkan adanya beberapa peluang yang mendukung seperti kondisi ekonomi masyarakat yang mendukung, kondisi sosial politik yang mendukung, kesadaran masyarakat yang sadar akan wisata,

penguasaan teknologi yang baik dan adanya Kerjasama dengan investor dan sponsor. Dari hasil analisis lingkungan internal menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki dinas yaitu seperti SDM yang memiliki kualitas yang baik, fasilitas akomodasi yang mulai mumpuni, mudah diakses, bekerjasama dengan agen travel, dan adanya UU No.9 Tahun 2009 tentang Pariwisata sehingga menjadikan menjadikan promosi pariwisata Kota Tomohon memiliki nilai tersendiri yang Khusus.

Dua berasal dari penelitian dilakukan oleh Ferry Samau, Joyce J. Rares, Helly F. Kolondam (Jurnal Administrasi Publik, 2021), dengan judul “ Startegi Pemerintah Pada Objek Wisata Pantai Pananuareng Desa Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Menjelaskan bahwa strategi yang dirumuskan oleh Dinas Pariwisata sudah terealisasi dapat dilihat dari memanfaatkan sumber daya dan tetap mengstabilkan ekonomi yang ada di Desa Tabukan Tengah khususnya dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dari segi penerapan oleh Dinas Pariwisata sudah terencana dengan baik, sekalipun anggaran walaupun dibidang sudah mencukupi juga pada penyediaan sarana dan prasaran wisata sudah cukup memadai juga adanya coordinator penjaga destinasi wisata,

Tiga berasal dari penelitian dilakukan oleh Iqbal Sapusha, Very Londa Novie Palar, (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2017). Dari segi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penganggungan Pengangguran Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Ini adalah menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara melalui program yang sudah dilaksanakan mulai dari Tahun 2010-2014

yaitu Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK). Ada 3 (tiga) item kegiatan yang dilakukan diantaranya kegiatan padat karya produktif yang dilaksanakan pada Tahun 2011 yang mencakup bidang pertanian yang dilaksanakan pada Tahun 2011 yang menyerap 88 orang, yang ke 2 (dua) adalah kegiatan padat karya infrastruktur yang berlangsung mulai dari Tahun 2018 sampai Tahun 2014 yang menyerap 616 orang. Kegiatan ini yaitu pembuatan jalan setapak di 5 (lima) yang diantaranya yaitu Desa Pastina, Bajo, Fagudu, Wainin, Waisum. Dan kegiatan yang ke 3 (tiga) adalah pelatihan berbasis masyarakat yang melibatkan 809 orang yang dilaksanakan di 14 (empat belas) desa se-kabupaten yang dimulai pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. Dan pada Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan program dalam rangka penanggulangan pengangguran terdapat 2 (dua) program yang dilakukan yaitu kegiatan Penamatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK).

## **KONSEP TEORI**

### **Konsep Strategi**

Menurut pendapat Hutapea, (2017), “Strategi menggambarkan respon secara cepat secara terus menerus maupun aktif tentang kesempatan dan ancaman eksternal dan juga internal yang menciptakan akibat dalam penelitian suatu organisasi”. Sehingga strategi bisa disimpulkan ialah suatu tata cara ataupun metode pencapaian tujuan secara efisien serta efektif serta respon secara cepat, terus menerus terhadap sesuatu kesempatan sesuatu rangkaian dari suatu keputusan

### **Konsep Pemeritahan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pada Ayat ke-2 (dua) menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah

adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan oleh dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya bahwa pemerintah melalui pemerintah daerah telah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintah yang ada di daerah, baik dari bagian administrasi sampai pada bagian pembangunan menjadi lebih baik yang tetap mengacu pada ndang-ndang otonomi daerah yang tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **Konsep Pengangguran**

Menurut Sapusha, dkk (2017) menjelaskan suatu kondisi seseorang tergolong jenis angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan serta tidak lagi mencari kerja. Untuk itu pengangguran ialah sesuatu kondisi yang keberadaannya baik keberadaan yang sampai saat ini masih dalam proses mencari kerja.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi serta proses-proses yang ditempuh dalam mencapai tujuan. Secara harafiah metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendiskripsikan gejala serta fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Fokus penelitian yaitu mengenai strategi pemerintah Menurut J.Winardi (2003: 113-114) dalam (Fajarwati, dkk 2021) yaitu: 1). Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang paling perlu dicapai. 2). Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. 3). Tahapan-

tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan

Peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan 10 informan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi UKM dan tenaga kerja: 1 orang.
2. Kepala Bagian Tenaga Kerja: 1 orang
3. Staf: 3 orang
4. Masyarakat: 5 orang

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah di kumpulkan dari informan yang telah ditentukan mengenai Analisis Strategi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang paling perlu dicapai.

Dilihat dari tujuan-tujuan yang perlu dicapai pastinya sasaran dari setiap strategi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dinilai sudah baik dilihat dari dalam pemberian bantuan serta memprioritaskan masyarakat yang memang belum memiliki pekerjaan dengan memberikan bantuan serta tetap memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lowongan-lowongan pekerjaan yang sedianya dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian pemerintah tetap mengupayakan untuk membantu memberikan bantuan kepada masyarakat.

2. Kebijakan-kebijakan yang amat berarti serta menunjukkan kegiatan-kegiatan.

Dilihat dari kebijakan dan kegiatan yang telah dibuat dinilai belum dapat menjadi jaminan untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud karena tidak semua masyarakat pengangguran dapat terjangkau dengan setiap strategi kebijakan yang ada walaupun upaya yang dilakukan pemerintah sudah baik dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud tetapi jika berbicara strategi kebijakan jika dinilai belum dapat menanggulangi pengangguran di kabupaten seperti strategi kebijakan yang dilaksanakan perekrutan calon tenaga kerja migran ke Jepang secara teknis banyak masyarakat yang sudah banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi tetapi karena banyaknya syarat-syarat administrasi sehingga banyak masyarakat yang ikut serta yang tidak lolos kemudian dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring juga menyebabkan kesulitan peserta yang mengikuti pembelajaran daring akses internet yang sulit untuk didapatkan karena di Kabupaten Kepulauan Talaud masih banyak desa yang masih sulit untuk mengakses jaringan internet sehingga seringkali peserta tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.

3. Tahapan-tahapan kegiatan pokok maupun program-program yang akan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang sudah ditetapkan.

Tahapan kegiatan dari strategi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud dinilai sudah cukup baik dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka menunjang strategi kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah

dalam hal ini oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Dalam melakukan strategi kebijakan pemerintah daerah oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja juga memiliki kendala dalam melaksanakan strategi seperti,

1. Kurangnya dana dalam melaksanakan kegiatan,
2. Kurangnya aparatur atau sumber daya manusia untuk menangani setiap sektor kegiatan.
3. Akses internet yang dinilai masih seringkali menghambat dinas dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai Strategi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam Menanggulangi Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud maka di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang paling perlu dicapai.

Tujuan atau sasaran dari strategi yang dibuat dan sedang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yang saya amati dan dapat saya simpulkan bahwa tujuan atau sasaran sudah dilaksanakan dengan baik dengan lebih memprioritaskan masyarakat pengangguran.

2. Kebijakan – kebijakan yang amat berarti serta menunjukan kegiatan-kegiatan

Menanggulangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud memerlukan strategi kebijakan yang dapat membantu untuk menurunkan angka pengangguran



di Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk itu strategi kebijakan yang dibuat dan sedang di laksanakan dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud belum dapat mengatasi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud karena tidak semua masyarakat pengangguran yang dapat di jangkau dengan strategi kebijakan yang sedang di laksanakan

3. Tahapat-tahapan Kegiatan Pokok Maupun Program-Program yang Akan Mencapai Tujuan yang Ditetapkan Dalam Batas-Batas Yang Sudah Ditetapkan

Tahapaan-tahapan kegiatan dari strategi yang di jalankan dapat disimpulkan sudah berjalan dengan manunjang strategi kebijakan yang ada dengan tahapan yang sudah dilakukan menunjukan bahwa strategi kebijakan yang dibuat bukanlah sebuah isu yang hanya lewat saja tetapi adanya implementasi nyata yang sedang di lakukan. Batas-batas yang telah ditetapkn dalam melakukan kegiatan

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran guna perbaikan di masa mendatang sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang paling perlu di capai.  
Dalam menjalankan strategi kebijakan untuk lebih melakukan pemeratan dan penjangingan kepada masyarakat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud di setiap desa dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga untuk turun di desa-desa yang ada Di Kabupaten Kepulauan Talaud atau bisa juga dengan menghubungi kepala desa di setiap desa di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendata masyarakat pengangguran
2. Kebijakan – kebijakan yang amat berarti serta menunjukan kegiatan-kegiatan

Dalam pembuatan strategi kebijakan dalam menanggulangi pengangguran, peneliti dapat memberikan saran yaitu Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potesi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Tahapat-tahapan Kegiatan Pokok Maupun Program-Program yang Akan Mencapai Tujuan yang Ditetapkan Dalam Batas-Batas Yang Sudah Ditetapkan

Dalam melaksanakan sebuah strategi kebijakan yang sudah di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan pastinya memerlukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya terlebih khusus masyarakat pengangguran yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dan harus berdasarkan regulasi yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bonde, F., Rares, J, J., & Londa, V, Y. (2018). *Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat, 4(62), 25-37
- Fajarwati, N & Lahmini, R. (2021). *Pengaruh Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang*. Jurnal Wacana Kinerja, 24(1),
- Hariadi, B. (2005). *Strategi Manajemen*. Jakarta : Bayu Media Publishing
- Huda, N. (2016). *Strategi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (DISNAKETRANS) dalam Menanggulangi Pengangguran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1661-1670.
- Miles, M, B., & Huberman, M, A., (2007). *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber*

- tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sadono, Sukirno (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sjafrizal (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang: Baduouse Media
- Samau, F., Rares, J. J., & Kolondam, F. H. (2021). *Strategi Pemerintah Pada Objek Wisata Pantai Pananuareng Desa Tariang Baru Kecamatan Tabukan di Masa Pandemi Covid-19 oriwisataleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. 111(7)
- Sambow, N, L., Kiayi, B., & Laloma , A. (2015). *Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*. Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat, 4(32)
- Sapusha, I., Londa, Y, V., & Palar, N. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Administrasi Publik Unsrat, 4(49).
- Tahir, D. Y., Kiyai, B., & Dengo S. (2021). *Strategi Promosi Pariwisata di Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik Unsrat 102(7)
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI
- SUMBER LAIN :
- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- <https://www.talaukab.bps.go.id>